



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian yang Digunakan**

##### **3.1.1 Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019, 2) metode penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis.”

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Informasi tersebut berkaitan dengan keterkaitan atau pengaruh antar variabel yakni Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Metode penelitian yang penulis gunakan yakni metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan verifikatif.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian *survey*. Menurut Sugiyono (2019, 7) Metode Kuantitatif adalah :

“Metode kuantitatif dapat di artikan sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivism. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.”

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2019, 6) sebagai berikut :

“Metode *survey* merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, *test*, wawancara terstruktur dan sebagainya.”

Dalam penelitian survey ini, penulis melakukan penelitian langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yang dimana penelitian ini dilakukan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antar variabel bebas dengan variabel terikat.

### **3.1.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, dianalisis, dan dikaji. Objek dalam penelitian ini yaitu menyangkut Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Restoran pada 5 Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

### **3.1.3 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019, 147) metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

“Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak restoran. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel digunakan rumus rata-rata (mean).

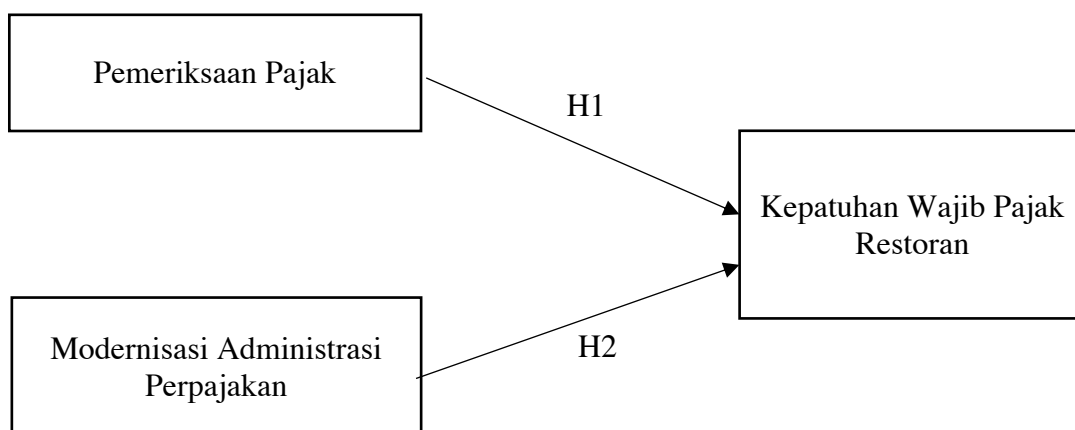
Pengertian Verifikatif menurut Mashyuri dan Zainuddin (2011, 45) adalah sebagai berikut :

“Analisis verifikatif adalah untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.”

Pendekatan verifikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, baik secara parsial maupun simultan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji T (parsial).

### 3.1.4 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang teliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.” Maka untuk menggambarkan hubungan antar variabel independent dan dependen, penulis menggambarkan model penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 3. 1**  
**Model Penelitian**

## 3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

### 3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Didalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan secara jelas sebelum memulai pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2019, 38) definisi variabel penelitian adalah :

“Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Menurut Hubungan antara satu variabel dengan variabel lain maka macam-macam variabel penelitian dapat dibedakan menjadi dua variabel utama yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

#### 3.2.1.1 Variabel *Independent* / Variabel bebas

Menurut Sugiyono (2019, 39) Variabel *independent* adalah sebagai berikut:

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat).”

Didalam penelitian ini terdapat dua variabel *independent* / variabel bebas yang diteliti yaitu :

##### 1. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dalam mengumpulkan, mengolah data/bukti/keterangan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan secara objektif dan profesional. (Rahayu 2020, 407)

Dimensi yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak yaitu pedoman pemeriksaan pajak. Menurut Rahayu (2017, 437) pedoman pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan  
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :
  - a. Telah mendapatkan Pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
  - b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
  - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
  - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus di dahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang seksama.
  - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan Tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
  - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan
  - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung dengan temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
  - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan Sasaran Pemeriksaan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
    - a). Berbagai faktor perbandingan,
    - b). Nilai absolut dari penyimpangan,
    - c). Sifat dari penyimpangan,
    - d). Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan,
    - e). Pengaruh penyimpangan,
    - f). Hubungan dengan permasalahan lainnya.
  - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

## 2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan sistem administrasi di bidang perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundamental pencapaian penerimaan pajak. (Rahayu 2020, 119)

Dimensi yang digunakan untuk mengukur Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017, 120) adalah sebagai berikut :

### 1. “Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep sistem administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

#### A. *Job des* Kantor pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan (Center of Policy Making and Analysis) atau hanya menjelaskan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional. Untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang business process, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk itu struktur KP DJP dibagi menjadi:

- Direktorat yang menangani *day-to-day operation* (1 sekretariat, 9 direktorat).
- Direktorat yang menangani perkembangan/transformatasi (3 direktorat).



- Untuk memperluas beberapa fungsi yang dianggap penting, maka dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstesifikasi perpajakan, dan hubungan masyarakat (*public relations*), serta
- Beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *transfer pricing*.

B. *Job des* Kantor Operasional

Kantor Operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan Wajib Pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara sistematis berdasarkan analisis resiko, unit vertical DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut Account Representative.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui:

- A. Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.
- B. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-filing (pengiriman SPT secara online melalui internet), e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), e-payment (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan e-registration (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- C. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP)

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Diharapkan ke depannya DJP dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kerja. Langkah perbaikan di bidang SDM yaitu:

- A. DJP melakukan pemetaan kompetensi (*Competency Mapping*) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
- B. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut.
- C. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai.
- D. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja.
- E. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat system jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta system remunerasi yang lebih jelas, adil, dan akuntabel.

#### 4. Pelaksanaan *Good Governance*

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:

- A. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.
- B. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional.
- C. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.”

#### 3.2.1.2 Variabel *Dependent* / Variabel Terikat

Menurut Sugiyono (2019, 39) pengertian Variabel *Dependent* adalah sebagai berikut :

“Variabel *dependent* sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *dependent*/variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020, 189) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material.”

Dimensi yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dapat dilihat dari Jenis Kepatuhan Wajib Pajak. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak menurut Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020, 190), ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. “Kepatuhan Formal, merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal :
  - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP,
  - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang,
  - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Material, merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :
  - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakannya.
  - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakannya.
  - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai Pihak Ketiga).

### **3.2.2 Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator yang akan menjadi bahan penyusunan instrument didalam kuesioner. Sesuai dengan judul skripsi yang di pilih yaitu

“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.” Terdapat tiga variabel yaitu :

1. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independent ( $X_1$ ).
2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai variabel independent( $X_2$ ).
3. Kepatuhan Wajib Pajak Restoran sebagai variabel dependen ( $Y$ ).

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian yang penulis jabarkan kedalam bentuk tabel operasionalisasi variabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Operasionalisasi Variabel Independen (X1) Pemeriksaan Pajak**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No
<b>Pemeriksaan Pajak</b> Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan Pemeriksaan Pajak dalam mengumpulkan, mengolah data/bukti/keterangan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan	Pedoman Pemeriksaan Pajak : Siti Kurnia Rahayu (2017, 437) 1. Pedoman Umum Pemeriksaan	a. Pemeriksa Pajak melakukan Pelatihan mengenai Pemeriksaan Pajak.	Ordinal	1
		b. Sikap Jujur pemeriksa pajak.	Ordinal	2
		c. Objektif dalam melakukan pemeriksaan		3
		d. Menggunakan keahliannya secara cermat sesuai dengan keadaan	Ordinal Ordinal	4-5

secara objektif dan professional  Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2020, 407)		sebenarnya tentang Wajib Pajak.	Ordinal	
			Ordinal	
	2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan	a. Pemeriksa pajak melakukan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan b. Melakukan pencocokan data untuk menentukan luas pemeriksaan. c. Melakukan pengamatan untuk menentukan luas pemeriksaan. d. Memberikan pendapat berdasarkan pada temuan yang kuat.	Ordinal	6-8
			Ordinal	9
			Ordinal	10-11
			Ordinal	12
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan	a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan. b. Laporan pemeriksaan dalam pengungkapan	Ordinal		13-14
			Ordinal	15-16

		<p>penyimpangan SPT disusun dengan memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksa.</p> <p>c. Laporan Pemeriksaan Pajak didukung oleh daftar yang lengkap serta rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.</p>	Ordinal	17-18
--	--	--	---------	-------

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel Independen (X2) Modernisasi Sistem**  
**Administrasi Perpajakan**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No
<p><b>Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan</b></p> <p>Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundamental pencapaian penerimaan pajak.</p> <p>Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2020, 119)</p>	<p>Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017, 120) Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :</p>			
	1. Restruktur Organisasi	a. Debirokratis pelayanan	Ordinal	19-21
		b. Struktur Organisasi berbasis fungsi	Ordinal	22-24
	2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.	a. <i>Standar Operating Procedures (SOP)</i>	Ordinal	25-26
		b. Penerapan system	Ordinal	27-29
		c. Pengembangan Sistem Informasi	Ordinal	30-31
	3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia	a. Melakukan pemetaan kompetensi	Ordinal	32
		b. Seluruh jabatan di evaluasi	Ordinal	33
		c. Beban kerja dari masing-masing jabatan di analisis	Ordinal	34
	d. Pembuatan SOP			
	e. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat jenjang karir	Ordinal	35	

			Ordinal	36
	4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	a. Penegakan kode etik pegawai b. Pembentukan <i>complaint center</i>	Ordinal	37-38
			Ordinal	39-40

Tabel 3.3

## Operasionalisasi Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No
<b>Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</b> Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Sumber : Siti Kurnia Rahayu	Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020, 190)  1. Kepatuhan Formal	a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,	Ordinal	41-42
		b. Kepatuhan dalam ketepatan menyampaikan SPTPD.	Ordinal	43
		c. Kepatuhan dalam ketepatan waktu untuk menyetorkan pajak terutang	Ordinal	44



(2020, 189)		d. Kepatuhan dalam ketepatan waktu untuk melakukan pelaporan pembayaran pajak.	Ordinal	45
	2. Kepatuhan Material	a. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.	Ordinal	46-47
		b. Membayar pajak dengan jujur.	Ordinal	48-49

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono 2019, 80).

Dari pengertian diatas, menunjukan bahwa populasi bukan hanya manusia, namun bisa juga objek atau benda-benda subjek yang dipelajari seperti dokumen yang bisa dianggap sebagai objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah subjek yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Unit observasi/ pengamatan pada penelitian ini adalah pegawai di 5 Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah yang bertugas melakukan pelayanan dan pengendalian di

lapangan dan juga sebagai konfirmasi dan koordinasi terhadap wajib pajak. Jumlah Populasi dari setiap divisi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3. 4**  
**Populasi Penelitian**

No	Nama Bagian	Populasi
1.	Unit Pelaksana Tennis (UPT) Pajak Daerah Wilayah I (SOREANG)	9
2.	Unit Pelaksana Tennis (UPT) Pajak Daerah Wilayah II (MARGAHAYU)	8
3.	Unit Pelaksana Tennis (UPT) Pajak Daerah Wilayah III (BALEENDAH)	7
4.	Unit Pelaksana Tennis (UPT) Pajak Daerah Wilayah IV (MAJALAYA)	8
5.	Unit Pelaksana Tennis (UPT) Pajak Daerah Wilayah IV (CILEUNYI)	10
<b>Jumlah Populasi</b>		<b>42</b>

### 3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019, 81) definisi sampel adalah sebagai berikut :

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.”

Pengukuran sampel merupakan salah satu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Selain itu juga diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus menunjukkan segala karakteristik populasi hingga terlihat dalam sampel yang dipilih, dengan kata lain sampel harus dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau mewakili (representatif). Namun, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. (Arikunto 2012, 104).

Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada 5 Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 42 orang responden. Dengan demikian, penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus atau yang biasa disebut sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah salah satu teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. (Sugiyono 2019, 85).

### **3.3.3 Teknik Sampling**

Sugiyono (2019, 81), menyatakan bahwa teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Menurut Sugiyono (2019, 82) terdapat dua teknik *sampling* yang digunakan yaitu :

1. *Probability Sampling*

*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi : *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, dan *area (cluster) sampling*.

2. *Non-Probability Sampling*

*Non-Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi : *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling insidental*, *purposive sampling*, *sampling jenuh*, dan *snowball sampling*.

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan adalah teknik *non-probability sampling* dengan memakai *sampling jenuh*.

### **3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Sumber Data**

Tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan dapat di pertanggungjawabkan. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2019, 225) mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut:

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.”

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada 5 Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

### **3.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang diperolehnya didapatkan langsung dari sumber utama fenomena yang sedang dikaji. Dalam penelitian yang penulis lakukan, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tersebut diantaranya dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kuesioner diberikan kepada responden di Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

### 3.5 Metode Analisis Data dan Penguji Hipotesis

#### 3.5.1 Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dari sebuah penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kuantitatif guna mendapatkan data penelitian. Menurut Sugiyono (2019, 243) :

“Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.”

Data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan survei penelitian dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian dilakukan Analisa untuk menarik kesimpulan. Adapun urutan analisis yang dilakukan yaitu :

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner, di mana yang diselidiki adalah sampel yang merupakan sebuah himpunan dari pengukuran yang dipilih.
2. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian menentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan di selidiki. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau kuesioner untuk menentukan nilai dari kuesioner tersebut, penulis menggunakan *skala likert*. Menurut Sugiyono (2019, 93), *Skala likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

3. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bidang-bidang yang telah ditetapkan. Setiap item dari kuesioner tersebut merupakan pertanyaan positif yang memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda.

**Tabel 3.5**  
**Skala Likert**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skor</b>
Sangat Setuju/Selalu/Sangat Positif/Sangat Patuh	5
Setuju/Sering/Positif/Patuh	4
Ragu-Ragu/Kadang-Kadang/ Netral/ Tidak Patuh	3
Tidak Setuju/Hampir Tidak Pernah/Negatif/ Tidak Patuh	2
Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/ Sangat Tidak Patuh	1

*Sumber : Sugiyono (2019, 94)*

4. Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel X dan Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden.

Adapun analisis data yang dilakukan penulis seperti meliputi analisis deskriptif dan analisis verifikatif sebagai berikut :

- a. Analisis Deskriptif
  1. Menganalisis Pemeriksaan Paja
  2. Menganalisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
  3. Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

b. Analisis Verifikatif

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Untuk menilai variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Y$ , maka analisis yang digunakan yaitu berdasarkan rata-rata didapat dengan menjumlah data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan responden.

Rumus rata-rata (*mean*) sebagai berikut :

Untuk variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Y$  :

$$\text{Untuk variabel } X_1 = me = \frac{\sum x_1}{N}$$

$$\text{Untuk variabel } X_2 = me = \frac{\sum x_2}{N}$$

$$\text{Untuk variabel } Y = me = \frac{\sum Y}{N}$$

Keterangan :

$Me$  = *Mean* (rata-rata)

$X$  = Nilai  $X$  ke I sampai ke n

$Y$  = Nilai  $Y$  ke I sampai ke n

$\Sigma$  = Epsilon (baca jumlah)

$N$  = Jumlah Responden



Setelah rata-rata dari masing-masing variabel didapat, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan tertinggi tersebut peneliti mengambil banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) dan skor tertinggi (5) dengan menggunakan *skala likert*.

**a). Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 18 pertanyaan untuk variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ), maka penulis menentukan kriteria berdasarkan skor tertinggi dan terendah.

$$\text{Skor Tertinggi} : 18 \times 5 = 90$$

$$\text{Skor Terendah} : 18 \times 1 = 18$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh panjang kelas interval

$$\text{sebesar} : \frac{90-18}{5} = 14,4$$

**Tabel 3. 6**

**Kriteria Pemeriksaan Pajak**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kategori</b>
18 – 32,4	Sangat Tidak Baik
32,4 – 46,8	Kurang Baik
46,8 – 61,2	Cukup Baik
61,2 - 75,6	Baik
75,6 - 90	Sangat Baik

**b). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 22 pertanyaan untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_2$ ), maka penulis menentukan kriteria berdasarkan skor tertinggi dan terendah.

$$\text{Skor Tertinggi} : 22 \times 5 = 110$$

$$\text{Skor Terendah} : 22 \times 1 = 22$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh panjang kelas interval

$$\text{sebesar} : \frac{110-22}{5} = 17,6$$

**Tabel 3. 7**

**Kriteria Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kategori</b>
22 – 39,6	Sangat Tidak Modern
39,6 – 57,2	Kurang Modern
57,2 – 74,8	Cukup Modern
74,8 – 92,4	Modern
92,4 - 110	Sangat Modern

**c). Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 9 pertanyaan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Restoran ( $Y$ ), maka penulis menentukan kriteria berdasarkan skor tertinggi dan terendah.

Skor Tertinggi :  $9 \times 5 = 45$

Skor Terendah :  $9 \times 1 = 9$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh panjang kelas interval

sebesar :  $\frac{45 - 9}{5} = 7,2$

**Tabel 3. 8**

**Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kategori</b>
9 – 16,2	Sangat Tidak Patuh
16,2 – 23,4	Kurang Patuh
23,4 – 30,6	Cukup Patuh
30,6 – 37,8	Patuh
37,8 - 45	Sangat Patuh

### **3.5.2 Pengujian Validitas dan Reabilitas Instrumen**

Dengan menggunakan pengujian validitas dan reabilitas dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat validitas suatu kuesioner. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

### 3.5.3.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019, 121), mengemukakan bahwa uji validitas adalah:

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Untuk mencari nilai validitas pada tiap item, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar validasi yang berlaku. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, maka alat tersebut semakin tepat sasaran, atau menunjukkan relevansi dari apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila hasil tes tersebut menjalankan fungsi pengukurannya dengan sesuai dan memberikan hasil yang sesuai dengan maksud diakukannya penelitian tersebut.

Untuk mengukur korelasi pada uji validitas menggunakan metode *Pearson Products Moment* yang dirumuskan sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\Sigma XY - (\Sigma X \cdot \Sigma Y)}{\sqrt{\{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n(\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = Koefisien Korelasi

$\Sigma XY$  = jumlah perkalian variabel x dan y

$\Sigma X$  = jumlah nilai variabel x

$\Sigma Y$  = jumlah nilai variabel y

$\Sigma X^2$  = jumlah pangkat dari nilai variabel x

$\Sigma Y^2$  = jumlah pangkat dari nilai variabel y

N = banyaknya sampel

Dasar Pengambilan Keputusan :

- a. Jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item-item pernyataan dari kuesioner adalah valid
- b. Jika nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item-item pernyataan dari kuesioner dianggap tidak valid.

Menurut Sugiyono (2019, 133), menyatakan bahwa syarat minimum untuk dianggap valid adalah nilai indeks validitasnya positif dan besarnya 0,3 keatas. Oleh karena itu, semua pernyataan yang memiliki tingkat korelasi dibawah 0,3 dianggap tidak valid dan harus diperbaiki.

### 3.5.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut dengan pengukuran yang reliabel. Meskipun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi namun ide pokok didalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas instrument dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan *test-retest (stability)*, *equivalent*, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrument dapat diuji dengan menganalisis konsistensi atas butir-butir yang pada instrument dan teknik tertentu (Sugiyono 2019, 121).

Uji Reabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan Cronbach's Alpha yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\alpha = \frac{k}{k - 1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_1^2}{\sum \sigma_x^2}\right)$$

Keterangan :

K = Jumlah soal/Pernyataan

$\sigma_1^2$  = Variansi setiap pernyataan

$\sigma_x^2$  = Variansi total tes

$\sum \sigma_1^2$  = Jumlah seluruh variansi setiap soal atau pernyataan

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan *Internal Consistency*. Formula yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cronbach's Alpha* yang dianggap paling sesuai untuk pengujian terhadap item-item yang memiliki skor 1 sampai 5 sekumpulan pernyataan dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,6. (Sujarweni 2014)

### 3.5.3 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan transformasi data dengan mengubah data ordinal menjadi interval, metode transformasi yang digunakan yakni *Method of Succesive Interval*. Secara garis besar langkah *Method Of Succesive Interval* adalah sebagai berikut :

1. Menentukan frekuensi setiap responden yaitu banyaknya responden yang memberikan respon untuk masing-masing kategori yang ada.
2. Menentukan nilai proporsi setiap responden yaitu dengan membagi setiap bilangan pada frekuensi, dengan banyaknya responden secara keseluruhan.

3. Jumlahkan proposi secara keseluruhan (setiap responden), sehingga diperoleh proposi kumulatif.
4. Tentukan nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif.
5. Menghitung *Scala Value* (SV) untuk masing-masing responden dengan rumus.

$$SV = \frac{(\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas})}{(\text{area di bawah batas atas} - \text{area di bawah batas bawah})}$$

6. Mengubah *Scala Value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dengan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil hingga diperoleh *Transformed Scaled Value* (TSV), yaitu :

$$Y = SV + (SV \text{ Min})$$

### **3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis**

#### **3.6.1 Rancangan Analisis**

Rancangan analisis untuk mengetahui korelasi dari empat variabel yang diteliti, dalam lingkup penelitian pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan perhitungan statistik. Menurut Sugiyono (2019, 63), mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah di nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data.”

Dalam menganalisis, dan melakukan uji hipotesis, perlu adanya satu rancangan dalam pengolahan data dari instrument yang digunakan. Tahap-tahap

dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai dengan penetapan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ), pemilihan tes statistic, perhitungan nilai statistik dan penetapan tingkat signifikan.

### 1. Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2016, 192) Analisis Regresi Linear Berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independent. Regresi linear berganda merupakan suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan variabel independent (X) dengan variabel dependen (Y) secara simultan maupun parsial. Menurut Sugiyono (2019, 192) Analisis Regresi Linear Berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

$\alpha$  = Bilangan Konstanta

$b_1b_2$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pemeriksaan Pajak

$X_2$  = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

### 2. Uji Korelasi Parsial

Analisi ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang berskala interval atau



rasio (parametrik). Menurut Sugiyono (2019, 183) rumus korelasi *Pearson Products Moment* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\Sigma XY - (\Sigma X \cdot \Sigma Y)}{\sqrt{\{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n(\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r$  = Koefisien Korelasi pearson (product moment)

$\Sigma XY$  = Jumlah perkalian variabel x dan y

$\Sigma X$  = Jumlah nilai variabel x

$\Sigma Y$  = Jumlah nilai variabel y

$\Sigma X^2$  = Jumlah pangkat dua nilai variabel x

$\Sigma Y^2$  = Jumlah pangkat dua nilai variabel y

$n$  = Banyaknya sampel

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019, 184) sebagai berikut :

**Tabel 3.9**

**Interpretasi Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

### 3.6.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yang perlu di uji kebenarannya dalam suatu penelitian. Uji signifikansi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial menggunakan uji  $t$ .

#### 3.6.2.1 Pengujian hipotesis secara parsial (Uji $t$ )

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan  $t$  tabel dan  $t$  hitung. Masing-masing  $t$  hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan  $t$  tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Berikut rumus uji  $t$  secara parsial menurut Sugiyono (2019, 184) sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{(1 - r^2)}}$$

Keterangan :

$t$  = Nilai Uji

$r$  = Koefisien Korelasi

$n$  = Jumlah Data

Pengujian secara individu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel sebab terhadap variabel akibat. Untuk pengujian pengaruh parsial digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut :

$H_0: px_1 \leq 0$ , artinya Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

$H_a: px_1 > 0$ , artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

$H_0: px_2 \leq 0$ , artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

$H_a: px_2 > 0$ , artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

### 3.6.2.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Setelah mengetahui koefisien korelasi, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  $X_1$  (Pemeriksaan Pajak) dan  $X_2$  (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak Restoran). Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan Koefisien Determinasi (KD) menurut Sugiyono (2018, 292) rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100$$

Dimana :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi yang dikuadratkan

Kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

- a. Jika Kd mendekati 0, maka pengaruh variabel independent yaitu pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak restoran lemah.

- b. Jika  $K_d$  mendekati 1, maka pengaruh variabel independent yaitu pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak restoran kuat.

### **3.7 Rancangan Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pernyataan/pertanyaan secara tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam uji laporan tentang pribadinya, atau hal-hal lain yang ia ketahui. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan secara tertutup atau terbuka. Rancangan kuesioner yang dibuat penulis adalah kuesioner tertutup dimana jawaban dibatasi atau sudah ditentukan oleh penulis, jumlah kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian.

Kuesioner terdiri dari 49 pertanyaan yaitu 18 pernyataan mengenai pemeriksaan pajak, 22 pernyataan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan dan 9 pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak restoran.

